

**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI NAGARI PRIORITAS
(Studi di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

SUPRIA WIDODO

05 / 64746

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Proses Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat
di Nagari Prioritas (Studi di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten
Pasaman Barat)

Nama : Supria Widodo

NIM : 2005/64746

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Oktober 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

Drs. Syakwan Lubis
NIP. 19540205 198103 1 004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Jumat 22 Oktober 2010 pukul 09.30 s/d 11.00 WIB

PROSES PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI PRIORITAS (Studi di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat)

Nama : Supria Widodo
BP/NIM : 2005/64746
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Oktober 2010

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	
Sekretaris	: Drs. Syakwan Lubis	
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	
Anggota	: Dra. Hj. Heni Candra Gustina	

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H Azwar Ananda, MA
NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Supria Widodo. 64746/2005. PROSES PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI PRIORITAS (Studi di Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasman Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas di nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui upaya awal yang ditempuh dalam mengatasi kendala pelaksanaan program tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena peneliti hanya memberikan gambaran tentang keadaan sebagaimana mestinya. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai *teknik snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas di nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat dilakukan melalui tahap sosialisasi program, penetapan nagari prioritas oleh Bupati, kajian bersama, semiloka hasil kajian bersama, sosialisasi program kepada perantau, implementasi program, dan pengendalian program. Kendala yang ditemui adalah kurangnya koordinasi antara SKPD terkait, minimnya biaya operasional program serta masih rendahnya partisipasi aparatur nagari dalam memberikan informasi kepada tim pembina nagari prioritas, disamping itu lokasi penyuluhan yang jauh, dan kurangnya partisipasi ketua kelompok tani sebagai penggerak kelompok tani yang ada di nagari Rabi Jonggor. Upaya awal yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah, tim pembina nagari prioritas telah meningkatkan intensitas pertemuan untuk mensinergiskan lagi pemberdayaan yang dilakukan di nagari prioritas Rabi Jonggor, tim pembina melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan mensosialisasikan program kepada perantau untuk mendapatkan bantuan dana, tim pembina telah memberikan surat teguran kepada Wali Nagari untuk meningkatkan partisipasi aparatur nagari. Selain itu, tim pembina telah mulai melakukan penyuluhan langsung di jorong-jorong yang ada di nagari Rabi Jonggor supaya penyuluhan bisa langsung ke masyarakat yang membutuhkan.



Allah SWT, memberikan hikmah ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendaki – *Nya*. Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. (Q.S *AL – Baqarah* : 269)

Bukankah telah kami lapangkan dadamu dan kami hilangkan beban yang memberati punggungmu dan kami tinggikan namamu. Sesungguhnya sesudah kesulitan, itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada *Allah* kamu berharap. (Q.S *Alam Nasrah* : 1-8)

Ya Allah....

Langkah demi langkah telah ku telusuri.....

Hari demi hari ku jalani.....

Walau berat yang ku jalani, namun....

*Kini ku sadari, jalan menuju sukses tidak beralaskan
permadani yang empuk melainkan penderitaan,
kesengsaraan bahkan meneteskan air mata....*

Atas ridho Allah SWT, saat ini sekeping cita-cita telah kugapai
Suatu harapan dan asa telah terbentang tuk meniti perjalanan hari esok
Yang masih panjang

Ya Allah...

*Ku menyadari sepenuhnya, apa yang aku perbuat sampai hari ini
Belum mampu untuk membalas walau setetes dari keringat orang
tuaku dan keluargaku*

Karenanya Ya Allah...

*Hamba mohon... jadikanlah setetes keringat mereka
Sebagai mutiara yang berkilau saat orang-orang kegelapan
Jadikanlah kelelahan mereka sebagai kendaraan saat orang-orang kelelahan dan jadikan
tetesan air mata mereka sebagai embun penyejuk saat orang-orang dahaga.*

Buat keluarga ku...

Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kupersembahkan karyaku ini. Pertanda bakti ku kepada yang tercinta **Abak Abdul Subianto (Alm)** dan **Ama Jawaher**. Cucuran keringatmu adalah cambuk bagi ku. Setiap tetes darahmu adalah semangat bagi ku. Terimalah ini sebagai tanda bakti dan terima kasih ku, Atas segala do'a, pengorbanan, dorongan dan perhatian yang telah diberikan. sehingga tercapai apa yang aku cita-citakan. Dan adik ku tersayang **Suhandoyo Wihardi**, raihlah citamu..masa depan akan lebih baik dengan usaha yang maksimal...

Buat keluarga besar ku.....

Terima kasih buat **Angku, Mak Urwo, Angah, Mamak, Uncu, Ayah, dan Oom, kak Aci, Aad, Mia, Yayan, Adri, Apin, Inggi, Anggun, Dani, Yaya, Alya, Dan Faza** terima kasih buat do'a, dorongan, dukungan, kasih sayang, dan nasehatnya. Memiliki keluarga seperti kalian merupakan anugerah terindah bagiku....

Kupersembahkan akšara bahagia yang tak terhingga buat yang terhormat **Bapak;**

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si dan Drs. Syakwan Lubis. Atas segala pengorbanan ilmu dan waktu yang telah dicurahkan untuk membimbing penyelesaian skripsiku ini.

Teristimewa buat seseorang yang slalu ada dihatiku **Fitriyal Maifela, S.Pd** ("You are my Inspiration", yank...makasih bwt support nya, kesetiaanya, kesabarannya, smangatnya, dan masakan yang enak, ^ _ ^).

Hidup tak berarti tanpa sahabat-sahabat ku, **rekan-rekan IAN 05: Sabun, Anggi D'Pig, Ringga, Babe, Amirudin, Rino Chip, Mantap, Robi, Wira, Ajo, Atriadi, Bg Rjo, Il, Bede, Puji, Gita, Suci, Anggi Royata, Angga, Begok, Q_Dunk, Q_Bam, Sugeng, Jhoni, Arif** (senang bisa berjuang mencapai cita bersama kalian). **Warga Ali Munar: Poco, Icen, Sojie, Rahmat, Mbah Ipul** (lai badarah,,hahaha..). **D'Butros n the gank: Ancah, Bg Deno, Bg Karyok, Ari, Riko, Ucup, Pulen, Tadjoe, Deni, Si Pren, Pelo, Kapuyuak** (bisuak wak bali rumah butros tu,,hahaha..). **Warga BB 18: Rozi, Amaik, Andesky, Jaka, Dj Ogen, Da Doly, Indra.** Dan juga teman-teman lainnya,,,senang bisa mengenal kalian semua,,semoga ilmu yang kitauntut ini bisa berguna bagi umat manusia...

by
xerxes

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PROSES PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI PRIORITAS (Studi di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat)**. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Azwar Ananda, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang sekaligus penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dan sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syakwan Lubis, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Heni Candra Gustina, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Endri, SH, selaku Wakil Ketua Tim Pembina Nagari Prioritas tingkat Kabupaten.
9. Ibu Maiyuslinar, SH Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
10. Bapak Minsar Lubis selaku Wali Nagari Rabi Jonggor dan perangkatnya.
11. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2005 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua. Amin.

Padang, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	10
2. Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat	13
3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	20
4. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan	22
5. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Prioritas	25
B. Kerangka Konseptual	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	39
E. Uji Keabsahan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum Nagari Rabi Jonggor	45
a. Letak Geografis	45
b. Kependudukan	46
c. Rumah Tangga Miskin.....	47
2. Temuan penelitian	48
a. Proses Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas Rabi Jonggor.....	49
b. Kendala dalam proses Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas Rabi Jonggor	60
c. Upaya mengatasi kendala dalam proses Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Prioritas Rabi Jonggor.....	64

B. Pembahasan	69
1. Proses Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat	70
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Prioritas Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat.....	77
c. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	39
Tabel 3.2 Jenis, Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	42
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jorong	47
Tabel 4.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin	48

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual.....	36
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada tahun 1998 membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Di Indonesia misalnya, krisis yang terjadi telah menghancurkan perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun drastis dan berujung pada angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi.

Seiring munculnya berbagai permasalahan masyarakat di bidang sosial ekonomi tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Namun tidak semua dari program-program pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai lembaga/dinas/instansi, baik berupa peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur untuk pelayanan sosial masyarakat, maupun penataan kelembagaan sosial ekonomi dan peningkatan peran serta masyarakat, namun hasil dari keseluruhan upaya tersebut belum optimal.

Konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pranarka dan Ony (1996:263) mengemukakan konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya. Maka perhatian gerakan pemberdayaan adalah untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya.

Pemberdayaan masyarakat secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan, dan memperbesar kemampuan masyarakat. Dalam kaitan ini, masyarakat yang ada bukan saja diarahkan pada kemajuan fisik (materi) namun juga pada kemajuan nilai-nilai non materi. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bukan saja membutuhkan SDM (masyarakat atau fasilitator), modal dan sarana, tapi juga membutuhkan nilai-nilai yang jelas, yang akan memandu serta mengorientasikan ke arah mana perubahan akan dilakukan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan berfungsi bukan menjadi obyek tapi menjadi subyek. Merekalah yang secara bersama-sama akan menentukan ke arah mana mereka akan berkembang. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki 2 (dua) arti pokok, yaitu: 1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program/kegiatan pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, dan 2) memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menciptakan masyarakat yang telah berkembang, yaitu suatu situasi masyarakat yang *full employment*, maksudnya semua warga masyarakat yang masuk ke dalam kategori usia angkatan kerja produktif mempunyai suatu pekerjaan tetap (Sondang P Siagian, 2003:24). Dengan terciptanya masyarakat yang telah berkembang tersebut maka secara otomatis kebutuhan masyarakat baik moril maupun materil akan terpenuhi dan ini akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Di Sumatera Barat, kondisi ini dapat dilihat dari sudut sosial ekonomi penduduk dan kondisi fisik daerah. Dari kondisi sosial ekonomi terutama tingkat kehidupan masyarakat, kurang lebih 21,32 % atau 233.975 KK (BPS Sumbar Maret, 2009) di Sumatera Barat berstatus miskin. Sementara dari kondisi fisik wilayah (nagari), masih banyak nagari yang di kategorikan tertinggal, terisolir, dan terbelakang, padahal sumber daya alamnya sangat potensial untuk berkembang.

Kondisi sosial ekonomi dan fisik sebagaimana dikemukakan di atas sekaligus menunjukkan bahwa usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih perlu ditingkatkan, terutama dalam koordinasi dan keterpaduan program/kegiatan, penentuan sasaran (target group) dan metode pelaksanaannya.

Sunyoto Usman (2006:15) menyatakan bahwa hal lain yang perlu dipikirkan ketika pembangunan daerah menjadi prioritas, adalah masalah interaksi antar instansi pemerintah. Selama ini, sebagai akibat dari ciri strategi pembangunan kita yang masih ditandai oleh sifat *executive planning*, instansi-instansi pemerintah

di daerah lebih banyak mengembangkan hubungan vertical dengan atasannya sendiri (di tingkat pusat atau provinsi) ketimbang menjalin koordinasi horizontal dengan instansi-instansi lain.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur dalam penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2005 telah menyiapkan sebuah strategi pemberdayaan masyarakat yang dibingkai dalam Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas yang dikoordinasikan oleh Gubernur Sumatera Barat dan melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi sebagai ketua, BAPPEDA Provinsi sebagai wakil ketua, Biro Pemerintahan Nagari sebagai wakil ketua, Unsur BPM sebagai sekretaris, dan SKPD terkait (sesuai kebutuhan) sebagai anggota.

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas merupakan program dan kegiatan pemberdayaan multisektor yang dilaksanakan secara terpadu di nagari prioritas, yaitu nagari yang merupakan kantong-kantong kemiskinan yang potensial untuk berkembang. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas ini adalah terlaksananya percepatan laju pertumbuhan pembangunan yang difokuskan

di nagari prioritas, menuju nagari yang mandiri dan setaraf dengan nagari-nagari yang telah berkembang dan maju.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2005 dijelaskan secara umum langkah-langkah kegiatan dari Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas yaitu: (1) Sosialisasi (Pemasyarakatan) Program, (2) Permintaan usulan nagari prioritas kepada Bupati, (3) Penetapan Nagari Prioritas, (4) Pendataan potensi dan permasalahan nagari prioritas, (5) Kajian bersama mengenai potensi dan permasalahan, program dan kegiatan yang direkomendasikan serta pembiayaan, (6) Semiloka, (7) sosialisasi kepada perantau, (8) Pelaksanaan program dan kegiatan, (9) Supervisi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Kanagarian Rabi Jonggor, Pasaman Barat, Sumatera Barat merupakan nagari prioritas periode 2009 s/d 2011 untuk Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/85/BUP-PASBAR/2009 tentang penunjukan Nagari Prioritas Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada saat observasi awal, pada awalnya BPMPPKB mengusulkan kepada Bupati 3 nagari yang berhak mendapatkan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritaaas, yaitu Nagari Batahan, Nagari Katiagan, dan Nagari Rabi Jonggor. Namun, dengan pertimbangan bahwa Nagari Rabi Jonggor lebih berpotensi dari pada dua nagari lainnya dan jarak dari pemerintahan pusat lebih dekat maka Bupati menetapkan Rabi Jonggor sebagai Nagari prioritas periode ke-2 setelah nagari Parit.

BPS (2008;22) menyatakan bahwa Nagari Rabi Jonggor memiliki wilayah seluas 289,98 KM² dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 850 dari 3.421 rumah tangga yang ada di Nagari Rabi Jonggor. Pada umumnya penduduk di Nagari Rabi Jonggor bekerja sebagai petani. Hasil tani yang diproduksi adalah padi, palawija, sayuran, buah-buahan, dan ternak.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari tim koordinasi nagari prioritas, dalam pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas ini terdapat beberapa masalah, antara lain kurangnya kontinuitas pembinaan, dan seringnya pergantian ahli yang melakukan pembinaan sehingga pembinaan yang dilakukan sebelumnya tidak efektif dan kadang menjadi tidak berguna karena pembina yang baru tidak mengetahui pembinaan apa yang telah diberikan kepada masyarakat pada pertemuan sebelumnya. Masalah lainnya adalah kurangnya sosialisasi program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas sehingga masyarakat maupun tm koordinasi yang ada di nagari tidak tahu arah dan tujuan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendalami bagaimana proses pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas ini, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul : **”PROSES PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI PRIORITAS (Studi di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat)”**.

B. Identifikasi, Batasan dan Perumusan masalah

1. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian di atas dan keterangan yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kontinuitas program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas.
- b. Seringnya pergantian pembina yang melakukan binaan di nagari prioritas.
- c. Pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas masih belum berjalan dengan baik.
- d. Pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas masih menemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
- e. Banyaknya masyarakat miskin yang belum berdaya di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat.
- f. Pada umumnya masyarakat miskin di nagari Rabi Jonggor masih rendah pendidikannya.
- g. Banyaknya masyarakat miskin yang belum mengetahui program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas
- h. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas masih belum optimal.

2. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat, kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan program tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas nagari Rabi Jonggor.

3. Perumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana proses pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas di Nagari Rabi Jonggor ?
- b) Apa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas tersebut ?
- c) Apa upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas tersebut ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas di Nagari Rabi Jonggor.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas.

D. Manfaat penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberi masukan terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis,
 - a) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas untuk penerapannya di masa yang akan datang,
 - b) Sebagai bahan masukan dan landasan berpikir bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Sebagai informasi bagi masyarakat dalam rangka peran monitoring dan evaluasi yang dimiliki masyarakat sesuai teori yang dikemukakan Ambar (2004;97) untuk mengawal jalannya program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas supaya lebih efektif dan tepat sasaran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memahami pengertian pemberdayaan terlebih dahulu kita harus mengenal asal kata pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*. *Empowerment* berasal dari kata *power* yang artinya *control, authority, dominion*. Awalan *emp* artinya *to put on to* atau *to cover with* jelasnya *more power*. Jadi, *empowering* artinya *passing on authority and responsibility* yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya (Soerjono, 1999:4).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Edi, 2005:59)

Konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu : suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya (Pranarka dan Ony, 1996:263).

Smith dalam Wibowo (2007:1) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah cara mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Sedangkan C. Greendberg dan Baron dalam Wibowo (2007:3) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dimana pekerja diberi peningkatan sejumlah otonom dan keleluasaan dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah; a) Kemauan politik yang mendukung; b) Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh; c) Motivasi; d) Potensi masyarakat; e) Peluang yang tersedia; f) Kerelaan mengalihkan wewenang; g) perlindungan; h) *Awariness* (kesadaran) (Suhendra 2006:86).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka), maupun karena kondisi eksternal misalnya, ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil (Edi, 2005:60).

Dalam pengembangan masyarakat mengacu pada prinsip *help the people to help themselves*. James Yen dalam Suhendra (2006:87) melakukan lima pendekatan sebagai berikut; *pertama*) pergi ke mereka, tinggal diantara mereka, bekerja dengan mereka, *kedua*) buat rencana bersama mereka, mulai dari yang mereka tahu, membangun dari yang mereka miliki, *ketiga*) mengajar dengan memberi contoh, belajar melalui mengerjakan, *keempat*) bukan sekedar tambal sulam, tapi kegiatan terpadu, bersistem, *kelima*) bukan membantu dengan memberi tapi dengan memerdekakan.

Ada beberapa indikator yang menyatakan bahwa suatu masyarakat dikatakan telah berdaya apabila memiliki indikator sebagai berikut; (a) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) Dapat berjalannya "*bottom up planning*"; (c) Kemampuan dan aktivitas ekonomi; (d) Kemampuan menyiapkan masa depan keluarga; (e) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan (Suhendra, 2006:43).

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah termasuk individu-individu yang memiliki masalah kemiskinan. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun daya

dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat akan menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor dalam pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang menjadi subjek dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Aktor disini melakukan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat tiga aktor penting yang turut andil dalam proses pemberdayaan, aktor tersebut antara lain (Ambar, 2004:97):

a. Masyarakat.

Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat, dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan publik.

Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi dibidang pendanaan, merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Pengerahan dana masyarakat sering terjadi untuk pembangunan yang akan dilakukan, dana tersebut lebih populer dengan sebutan swadaya masyarakat.

Peran masyarakat yang lain dan memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat.

Vaneklasen dalam Karjuni (2009) mengembangkan beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat itu antara lain :

1) Partisipasi atas nama.

Partisipasi atas nama merupakan partisipasi manipulatif dimana masyarakat hanya di atas namakan melalui tokoh-tokoh *formal* atau pertemuan satu arah.

2) Partisipasi pasif.

Partisipasi pasif merupakan bentuk partisipasi dimana masyarakat dilibatkan sebagai massa, peserta, atau partisipan dari satu kegiatan.

3) Partisipasi lewat konsultasi.

Partisipasi lewat konsultasi merupakan bentuk partisipasi yang menjadikan masyarakat sebagai subjek konsultasi dari ide kegiatan

tertentu, keputusan mengenai bentuk dan isi kegiatan bukan oleh masyarakat tetapi pelaksana.

4) Partisipasi insentif material.

Partisipasi insentif material merupakan partisipasi oleh masyarakat karena insentif material tertentu yang disediakan.

5) Partisipasi fungsional.

Partisipasi fungsional merupakan partisipasi oleh masyarakat di dalam berbagai aspek suatu kegiatan yang berbagai persyaratan dan kondisinya telah ditetapkan di dalam suatu bentuk.

6) Partisipasi interaktif.

Partisipasi interaktif merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam suatu kegiatan dalam berbagai aspek sejak dari perencanaan sampai evaluasi dimana ide kegiatan dimunculkan oleh pihak luar dan disediakan berbagai fasilitas yang diperlukan.

7) Mobilisasi sendiri.

Mobilisasi sendiri merupakan bentuk partisipasi dimana masyarakat mengambil inisiatif, melaksanakan kegiatan pada berbagai tahap secara sendiri dan memobilisasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri.

b. Pemerintah

Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan. Namun mengingat adanya kemungkinan terjadi sengketa didalam perjalanan pembangunan tersebut

maka diperlukan mediasi, terutama untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar tidak merugikan masyarakat.

Untuk menjaga kualitas hasil, pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas, dan berkelanjutan. Program yang sudah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya hendaknya dapat dipelihara, dimonitor oleh pemerintah berikutnya.

Dalam rangka memudahkan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, menjaga kualitas dan tanggung jawab bermitra hendaknya pemerintah menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi, pada setiap program pembangunan. Kriteria yang dibangun tersebut dikonsultasikan, didiskusikan dengan pihak masyarakat "yang memiliki kompetensi/profesi relevan".

Peran lain yang dimiliki pemerintah adalah dalam hal mensosialisasikan program pemberdayaan agar pemberdayaan tersebut bisa lebih diketahui oleh masyarakat. Dengan begitu pemberdayaan yang akan dilakukan akan lebih efektif. George Herbert Mead (Wikipedia) berpendapat bahwa sosialisasi dapat dibedakan atas sosialisasi *formal* dan *informal*. Sosialisasi *formal* dilakukan melalui lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam negara, sedangkan sosialisasi *informal* dilakukan melalui pergaulan sehari-hari. Sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam". Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya.

2) Tahap meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang anma diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (*Significant other*)

3) Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

4) Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage/Generalized other*)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama-- bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya-- secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

c. Swasta.

Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah (*policy action*) bersama masyarakat. Peran demikian perlu ditekankan, supaya terjadi variasi analisis berdasarkan kondisi khusus dan bersifat kasuistik ditingkat daerah. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan akan lebih mendekati kebutuhan lokal. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. Dengan demikian bentuk fasilitasi akan berupa penerjunan tenaga ahli dan sangat terampil serta teknologi yang memadai.

CSR atau *Corporate Social Responsibility* yang diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan eksplorasi ataupun perusahaan asing yang berada di Indonesia merupakan sebuah peluang baru dalam program pemberdayaan. CSR juga dipandang sebagai aktor dalam pemberdayaan, hal ini akan mendobrak mitos yang berkembang selama ini, dukungan usaha pemberdayaan hanya datang dari dua aktor yaitu pemerintah dan lembaga donor asing. Jika tidak dana program pemberdayaan hadir dari kegiatan swadaya masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Muhtadi dalam Robby (2010:13) kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat, kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan, adanya kerawanan dalam kehidupan sehingga masyarakat terisolasi, mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi. Konsep pemberdayaan masyarakat miskin dimaksudkan sebagai upaya merubah kondisi dan perilaku rakyat miskin sehingga mandiri dan produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kompleksitas masalah yang dihadapi rakyat miskin disebabkan oleh ketidakberdayaan rakyat, dan jika diidentifikasi, penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling terkait, yaitu; (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik motivasi maupun penguasaan manajemen dan teknologi, (2) kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan, (3) prasarana dan sarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, (4) minimnya modal, dan (5) berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada (Gunawan. 2007:8).

BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu: (Jika memenuhi salah satu kriteria dikategorikan sebagai “miskin”)

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Melihat kondisi ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi maupun sosial, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah penanggulangannya diantaranya a) pelaksanaan program pembangunan di daerah terpencil, b) peningkatan pendidikan masyarakat, c) pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, dan d) pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas yang juga untuk menghapuskan kemiskinan.

4. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan

a. Bentuk pelaksanaan program.

Pelaksanaan suatu program dapat dilihat melalui 2 cara yaitu dengan bentuk *topdown* dan *bottom up*. Pelaksanaan secara *top down* merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan dimana semua alur baik dalam bentuk ide, bentuk kegiatan dan dana berasal berasal dari pemerintah pusat, disini masyarakat hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pelaksanaan secara *bottom up* merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan dimana masyarakat dituntut untuk memberikan ide dan masukan tentang kegiatan apa yang cocok dilaksanakan di daerah tempat mereka tinggal.

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas merupakan suatu program pengentasan kemiskinan bersifat *top down*, disini pemerintah melalui masing-masing SKPD menyusun program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan secara rinci sesuai dengan prinsip keterpaduan dalam Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas. Program/kegiatan tersebut disusun berdasarkan profil dan/hasil musrenbang yang telah dilakukan di nagari. Kemudian program yang telah disusun secara sinergis oleh SKPD terkait diterapkan di masyarakat.

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan, empat indikator tersebut adalah *pertama*) ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah, *kedua*) ketepatan pelaksanaannya, *ketiga*) ketepatan sasarannya, *keempat*) ketepatan lingkungannya (Riant, 2006:137).

Berhasil atau gagalnya suatu kebijakan tergantung pada beberapa kondisi yaitu a). Ketepatan pelaksanaan kebijakan, b). Konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaannya, c). Terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan (Mustopadidjaja, 2003:37).

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Mustopadidjaja yang mengemukakan bahwa berhasil atau gagalnya suatu kebijakan tergantung dari beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas.

c. Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin

Pada setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut kendala.

Menurut Hansen dalam (Robi, 2010:18), jenis kendala berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kendala internal, merupakan faktor-faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam berupa kendala sumber daya. Dalam penelitian ini kendala berupa kurang profesionalnya kinerja tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Kendala eksternal, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar instansi. Kendala dari luar dapat berupa pengaruh lingkungan tempat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin tersebut.

d. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.

Kartasmita (1995:4) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu :

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum maju/berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan keberpihakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak makin tertinggal jauh, melainkan dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi perkembangannya.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan masyarakat miskin lebih menekankan kepada aspek kemandirian dengan memberikan bantuan dari pemerintah guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

5. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Prioritas

Berikut akan di jelaskan mengenai Program Terpadu Pemberdayaan di Nagari Prioritas berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas.

a. Pengertian, tujuan dan sasaran program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas

1) Pengertian Program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas

Program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas merupakan program dan kegiatan pemberdayaan multisektor yang dilaksanakan secara terpadu di nagari prioritas, yaitu nagari yang merupakan kantong-kantong kemiskinan yang potensial untuk berkembang.

2) Tujuan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas ini adalah: *Pertama*, tujuan umum yang ingin dicapai program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas ini adalah terlaksananya percepatan laju pertumbuhan pembangunan yang difokuskan di nagari prioritas, menuju nagari yang mandiri dan setaraf dengan nagari-nagari yang telah berkembang dan maju. *Kedua*, tujuan khusus diantaranya: a) meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di nagari prioritas, b) menumbuhkan, mendorong, menggerakkan prakarsa/kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, c) meningkatkan ekonomi nagari melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di nagari prioritas, d) membina/memfasilitasi dan mengembangkan kelembagaan sosial dan ekonomi yang ada di nagari prioritas sehingga berfungsi dengan baik, e)

meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari prioritas dalam pengelolaan pembangunan.

3) Sasaran program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas

Program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas difokuskan kepada nagari-nagari yang merupakan kantong kemiskinan, akan tetapi potensial untuk berkembang. Oleh karena itu sasaran utamanya adalah: (1) masyarakat penduduk miskin, (2) infrastruktur pelayanan sosial masyarakat, dan (3) kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

b. Landasan hukum pelaksanaan program.

Dasar hukum pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pedoman umum pelaksanaan Program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2005.

c. Asumsi, Pendekatan dan prinsip pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas

1) Asumsi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas, di gunakan asumsi sebagai berikut:

a) Sistem sektoral yang berorientasi kepada pencapaian target nasional maupun daerah yang berlaku dalam pembangunan sampai

saat ini belum banyak menyentuh kebutuhan masyarakat nagari, terutama masyarakat miskin.

- b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari, pada satu sisi belum melihatkan fungsi dan peranannya yang hakiki, sementara di sisi lain pelaksanaan pembangunan oleh SKPD cenderung tidak memanfaatkan LPM.
- c) Program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD, baik oleh SKPD Propinsi maupun SKPD Kabupaten belum terpadu dan terfokus kepada pengentasan kemiskinan, ketertinggalan, keterisoliran, dan keterbelakangan masyarakat nagari.
- d) Dengan tugas kewenangan yang ada, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi dan SKPD-PM di Kabupaten mampu memadukan dan mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju satu kesatuan proses dan arah pembangunan nagari yang dapat diukur keberhasilannya.

2) Pendekatan

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas diperlukan pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan legalitas, maksudnya dalam pelaksanaan program/kegiatan di nagari prioritas tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan nagari.

- b) Pendekatan structural ; berarti pelaksanaan pembangunan di nagari prioritas dilakukan oleh SKPD Propinsi dan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, secara terpadu dan sinergitas.
- c) Pendekatan empiris ; bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di nagari prioritas diawali dengan penetapan kebijakan, penyusunan dan rekomendasi program/kegiatan, harus selalu memperhatikan berbagai pengalaman pembangunan sebelumnya, dengan berbagai hasil, serta melihat kepada permasalahan dan potensi nagari prioritas.
- d) Pendekatan sosio-kultural ; berarti dalam melaksanakan program/kegiatan di nagari prioritas perlu memperhatikan dan memanfaatkan nilai-nilai sosial budaya yang positif dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
- e) Pendekatan wilayah dan multisektor ; yaitu dengan menjadikan nagari sebagai lokasi serta mengembangkan dan menerapkan berbagai program/kegiatan dari semua sector yang berkepentingan.

3) Prinsip pelaksanaan

Program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas diupayakan agar dilancarkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Transparan (*transparency*), artinya seluruh kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 - b) Partisipasi (*participation*), artinya seluruh komponen masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.
 - c) Akuntabilitas (*accountability*), artinya seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrative.
 - d) Keberlanjutan (*sustainability*), artinya hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri.
- d. Proses pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas

Pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu;

1) Sosialisasi (pemasyarakatan) program

Sosialisasi program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas adalah pertemuan antara BPM Propinsi Sumatera Barat dengan seluruh SKPD-PM kabupaten yang diundang/prioritas, dalam rangka mengenalkan dan/atau menjelaskan program sesuai dengan pedoman umum pelaksanaannya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh SKPD-PM Kabupaten dan Propinsi Sumatera Barat tentang Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari prioritas.

Peserta sosialisasi ini adalah: (1) kepala BPM Propinsi Sumatera Barat beserta staf, (2) kepala SKPD-PM Kabupaten, (3) SKPD propinsi yang terkait, (4) LSM

2) Penetapan nagari prioritas oleh Bupati

Penetapan nagari prioritas oleh Bupati bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten melakukan kegiatan pemilihan calon nagari prioritas secara akurat dan tepat waktu. Dengan begitu penetapan dan pengiriman nama calon nagari prioritas oleh setiap kabupaten sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pemberdayaan nagari yang bersangkutan

3) Kajian bersama

Kajian bersama adalah suatu forum/pertemuan antara LSM dengan pemerintah nagari yang telah ditetapkan sebagai nagari prioritas dengan keputusan gubernur untuk membahas program/kegiatan pemberdayaan di nagari prioritas tersebut. Kajian bersama ini difasilitasi oleh pemda Kabupaten (SKPD-PM, dan Bappeda), dan Pemda Propinsi (BPM).

Kajian bersam bertujuan untuk membahas potensi, permasalahan, dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di nagari prioritas guna merekomendasikan program/kegiatan yang dibiayai dengan pola imbal swadaya (*matching grant*).

4) Semiloka hasil kajian bersama

Semiloka hasil kajian bersama adalah suatu forum pembahasan hasil kajian bersama untuk mempertegas tugas dan peran masing-masing

SKPD. Dengan begitu maka akan tersusun program dan aksi bersama antar SKPD di tingkat propinsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat lebih efektif dan efisien.

5) Sosialisasi kepada perantau

Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di nagari prioritas sekaligus mengajak perantau untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

6) Implementasi program

Tahap ini adalah rangkaian proses sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan rencana kerja seluruh SKPD dan pihak-pihak lainnya yang terkait (*stakeholders*) di nagari prioritas

7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

a) Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan secara internal dan eksternal terhadap seluruh proses pelaksanaan program/kegiatan, agar pencapaian kinerja sasaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemantauan di propinsi dilakukan oleh masing-masing SKPD dan oleh tim koordinasi, di tingkat kabupaten dilakukan oleh setiap SKPD terkait dan tim koordinasi, sedangkan pemantauan di nagari dilakukan oleh wali nagari, LPM, BPAN, dan lain-lain.

b) Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan oleh Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, SKPD-PM kabupaten dan BPM Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan evaluasi program oleh LSM dilakukan setelah program/kegiatan berjalan selama tiga (tiga) tahun, dan apabila diperlukan dapat dilakukan *med review* untuk penyempurnaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas.

c) Pelaporan

Pelaporan dibuat secara bulanan dan tahunan oleh wali nagari, SKPD-PM kabupaten dan BPM propinsi.

e. Pembiayaan, jangka waktu dan indikator keberhasilan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas

1) Pembiayaan

Pembiayaan Program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas berasal dari:

- a) APBN (melalui SKPD terkait)
- b) APBD Propinsi Sumatera Barat (melalui SKPD terkait)
- c) APBD Kabupaten (melalui SKPD terkait)
- d) Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) atau nama lain
- e) Swadaya Masyarakat (ranah dan rantau)

2) Jangka waktu

Jangka waktu program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas dilakukan minimal selama 3 (tiga) tahun, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

3) Indikator keberhasilan program

Indikator keberhasilan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas, sebagai berikut:

- a) Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat nagari pada setiap aktivitas pembangunan nagari
- b) Tertatanya kelembagaan/organisasi sosial dan ekonomi yang ada serta terjalinnya kerjasama diantara semua organisasi tersebut secara efektif dan bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat nagari
- c) Terlaksananya musrenbang nagari secara partisipatif dan dapat menghasilkan rencana pembangunan nagari yang aspiratif dan akomodatif
- d) Terlaksananya pemerintahan nagari dengan lancar, efektif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat nagari
- e) Makin berkurangnya jumlah penduduk miskin
- f) Terciptanya kehidupan masyarakat nagari yang tertib dan aman, bersih dan sehat, yang bernafaskan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” dan budaya lain yang dianut masyarakat mentawai
- g) Tersedianya prasarana dan sarana sosial dasar yang memadai di nagari prioritas

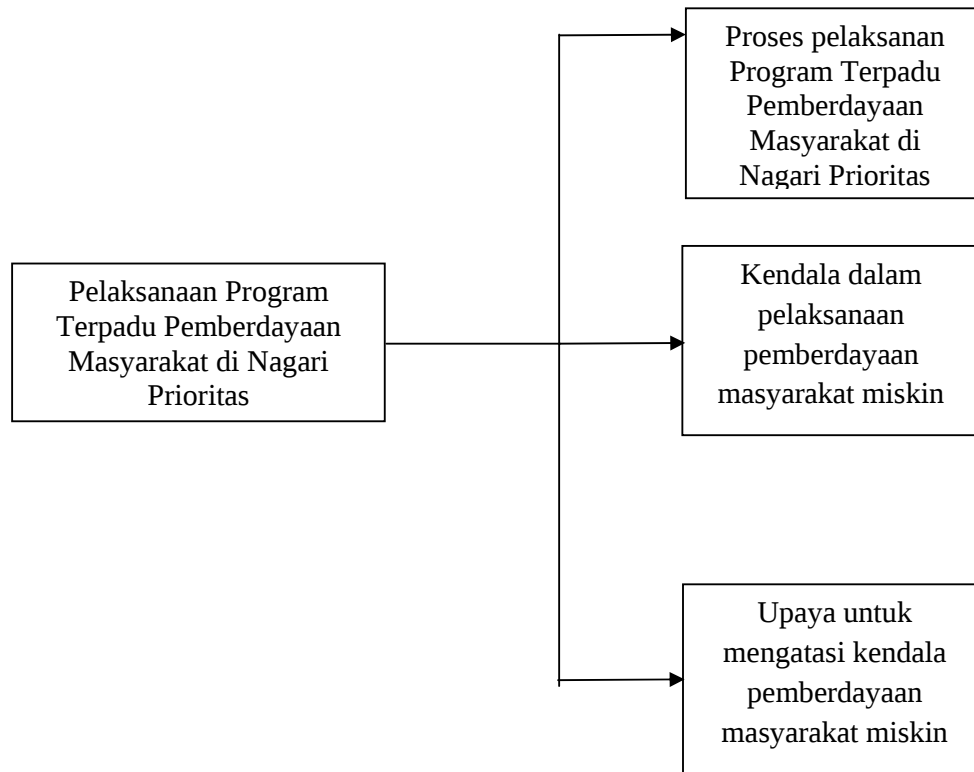
B. Kerangka Konseptual

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas merupakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan didanai oleh pemerintah dan swadaya masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih saja ada masyarakat yang belum mengetahui arti dan tujuan program tersebut. Hal ini bisa saja kurangnya sosialisasi dan masih belum optimalnya pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas itu sendiri yang masih kurang.

Berdasarkan masalah tersebut, perlu kiranya pemerintah melakukan revisi kembali pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas baik dalam hal sosialisasi, pelaksanaan maupun manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat melalui program tersebut. Apabila aparat pemerintah telah memahami hal tersebut, maka dalam pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas nantinya akan didapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :

Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat sebagai perwujudan dari program pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di nagari yang merupakan kantong kemiskinan khususnya di Nagari Rabi Jonggor ini telah terlaksana namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya kendala-kendala yang menghambat proses terlaksananya program tersebut.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program terpadu pemberdayaan masyarakat di nagari prioritas terbagi atas dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah : (1) kurangnya koordinasi antara SKPD terkait yang melakukan kegiatan pemberdayaan di nagari Rabi Jonggor; (2) Minimnya biaya operasional program; (3) kurangnya partisipasi aparatur nagari. Sedangkan kendala eksternal yaitu : (1) lokasi penyuluhan yang sulit dijangkau masyarakat; (2) kurangnya partisipasi ketua kelompok tani.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam menghadapi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program terpadu pemberdayaan

masyarakat di nagari prioritas adalah : (1) Terhadap kendala internal yaitu: Terkait dengan kurangnya koordinasi antara SKPD terkait, tim pembina nagari prioritas telah meningkatkan intensitas pertemuan untuk mensinergiskan lagi pemberdayaan yang dilakukan di nagari prioritas Rabi Jonggor sehingga pelaksanaan program bisa lebih efektif dan efisien, dan setiap instansi terkait mampu menjalankan tugas dan fungsinya, terkait dengan minimnya biaya operasional program, tim pembina melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan mensosialisasikan program kepada perantau untuk mendapatkan bantuan dana, terkait aparaturnagari yang kurang berpartisipasi, tim pembina telah memberikan surat teguran kepada Wali Nagari. (2) Terhadap kendala eksternal yaitu : Terkait dengan lokasi penyuluhan yang sulit dijangkau masyarakat, tim pembina telah mulai melakukan penyuluhan langsung di jorong-jorong yang ada di nagari Rabi Jonggor, upaya tersebut sekaligus mengatasi kendala dalam hal kurangnya partisipasi ketua kelompok tani dalam menyampaikan informasi dan inovasi yang didapatkan dari penyuluhan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas sebagai alternatif dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, maka antara petugas-petugas pelaksana kegiatan harus menjalin suatu komunikasi yang efektif

yang nantinya akan mempermudah hubungan koordinasi antara sesama petugas.

2. Dalam menetapkan usulan kegiatan yang akan didanai pada masa yang akan datang, sebaiknya diutamakan kegiatan yang bersifat pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat, agar masyarakat mampu dan bisa mengembangkan potensi yang mereka dapatkan demi meningkatkan taraf hidupnya.
3. Sosialisasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas lebih ditingkatkan supaya masyarakat lebih mengetahui tentang Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Prioritas.
4. Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mandiri dan diharapkan nantinya masyarakat juga bisa memecahkan sendiri masalah yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model pemberdayaan*. Yogyakarta; Gava Media.
- BPS. 2008. *Gunung Tuleh Dalam Angka Tahun 2008*. Pasaman Barat: BPS
- Burhan Bungin. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Edi Soeharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reffika Aditama
- GINANJAR Kartasasmita. 1995. *pemberdayaan masyarakat : sebuah tinjauan administrasi*. Malang : Unibraw Press.
- Gunawan Sumodiningrat. 2007. *Pemberdayaan Sosial : Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Karjuni Dt Maani. 2009. *Materi Kuliah Pemberdayaan Masyarakat, disampaikan pada perkuliahan tanggal 17 april 2008*. Padang : UNP.
- Lexy J Muleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik ; formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- Ony S Prijono dan A. M. W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.
- Poerdarminta. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.